

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi 4 bidang sebagai berikut:
  - a. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, memberikan pelatihan ketrampilan terhadap penyandang disabilitas, anak dan lansia terlantar seperti membuat souvenir, keset dan batik.
  - b. Bidang Pemberdayaan Sosial, menciptakan program E-Warung untuk memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. E-Warung merupakan tempat transaksi yang resmi bagi penerima bantuan BPNT. Hal ini dikarenakan transaksi penerima bantuan BPNT hanya boleh dilakukan di E-Warung yang resmi dan telah bersertifikat.
  - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memberikan bantuan bagi korban bencana alam, bencana sosial, korban tindak kekerasan, dan pekerja imigran, baik berupa makanan, pakaian atau pendampingan. Misalnya pembuatan surat rujukan ke rumah sakit bagi korban bencana di Palu, penggalangan dana di depan kantor dinas sosial, kunjungan serta penyerahan bantuan secara langsung ke lokasi bencana angin puting beliung di kecamatan Nglegok
  - c. Bidang Penanganan Fakir Miskin, menentukan masyarakat penerima bantuan dari dinas sosial seperti program keluarga harapan (PKH). Dalam program ini keluarga kurang mampu mendapat bantuan berupa

uang tunai. Dalam setiap bulannya penerima bantuan PKH mengadakan pertemuan untuk mendapat arahan dan bimbingan dari pendamping PKH dengan syarat membawa barang bekas (rosokan) untuk dijual ke pengepul dan uangnya ditabung.

2. Kendala Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi beberapa faktor, yaitu dana, kerjasama dengan pihak luar, dan kerjasama antar bidang-bidang Dinas Sosial Kabupaten Blitar
3. Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial menurut fiqih siyasah dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Bidang Penanganan Fakir Miskin mengadakan program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, seperti PKH sebagaimana konsep fiqih siyasah maliyyah yang mewajibkan negara memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan primernya
  - b. Islam menawarkan berbagai model untuk meningkatkan kesejahteraan umatnya, diantaranya dengan perintah bekerja, hal ini diwujudkan oleh bidang pemberdayaan sosial dengan mengadakan E-Warung sebagai tempat transaksi penerima bantuan BPNT.
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memberikan bantuan berupa perlindungan sosial, terhadap korban bencana alam, korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja imigran sebagaimana Islam yang mengatur tentang pemberian perlindungan dan jaminan

sosial kepada seseorang dalam keadaan darurat seperti terjadi bencana alam.

- d. Islam mendorong setiap orang untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki agar bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup, hal ini diwujudkan oleh bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial dengan memberikan pelatihan ketrampilan bagi PMKS seperti membuat keset, batik, dan souvenir.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah, memberikan dana yang cukup bagi Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk menunjang kelancaran dalam melakukan kegiatan seperti sosialisasi dan pelatihan ketrampilan.
2. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Blitar, memperbaiki koordinasi dengan pihak luar seperti Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan membuat jadwal yang pasti terkait razia yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga ketika penyerahan klient pihak Dinas Sosial Kabupaten Blitar bisa langsung segera menindaklanjuti. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Blitar perlu meningkatkan kreativitas untuk mengadakan kegiatan guna mengumpulkan pegawai setiap bidang, sehingga dalam kegiatan ini semua bidang dapat melakukan koordinasi terkait penanganan PMKS kedepannya.
3. Bagi Masyarakat, ikut berpartisipasi dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti memberikan data yang benar ketika

dilakukan survei agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Selain itu masyarakat juga dapat ikut menekan angka PMKS dengan bekerja keras dan akan lebih baik jika dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

## DAFTAR RUJUKAN

- A.F, Munawwir dan Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: pustaka progresif, 1999
- A.Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.I, 2004
- Al-Maliki, Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam*, Terj. oleh Ibnu Sholah Al-Izzah, Bangil, Jatim, 1422 H/ 2001 M
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Araby, 1978, Edisi terj. oleh Fadhli Bahri, Lc, *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2000
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah, Cet. I, 1989
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Edisi Terj. Oleh Fadhli Bahri, Lc, Jakarta : Darul falah, 2000
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-4, buku ke- 5, 1999
- Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011
- Halim, M. Nipan Abdul, *Mengapa Zakat Disyariatkan*, Bandung : M2S, 2001
- Hawwa, Sa'id, *Al-Islam, Terjemahan oleh. Abdul Hayyie Al-Kattani, Arif Chasanul Muna dan Sulaiman Mapiase*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Ibrahim Muhammad, Quth, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*, edisi terj. Oleh Ahmad Syarifuddin Shlmeh, Pustaka Azzam, Cet. I, 2002
- Katsir, Ibnu, *Al-Bidayah wan Nihayah, Masa Khulafaurrasyidin*, Cet. I, Edisi terjemahan oleh Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta : Darul Haq, 2002
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011, *Al-Quran dan Terjemahan*, CV,

- Mikraj Khazanah Ilmu, Bandung
- Madjid, Nurcholis, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Mudhofir, Abdullah, *Jihat Tanpa Kekerasan*, Jakarta : Inti Media, 2009
- Nazori Majid, M, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian, Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), Yogyakarta, 2003
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.8 Th.2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Bupati Blitar N0.48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar
- Qardhawi, Yusuf, *Fiquz Zakah, Muassasat ar-Risalah*, Beirut, Libanon, Cet. II, 1973, Terj. Oleh Salman Harun (jilid I), Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (jilid II), *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. V, 1999
- Ridlo, Ali, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, Jurnal Al-‘Adl, vol. 2, 2013
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Sleman, Penerbit Ekonisia Kampus FE UII, 2003
- Tasbih, Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal AL-FIKR*, 3, 2010
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu’atul Fatawa, Maktabah al-Ubaikan, Riyadh, 1419 H/1998 M, Ed. Terj., Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah, Bab macam-macam Harta Negara, Darul Haq, Jakarta, 2005, hlm. 296-314, Lihat juga A.A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terj, oleh H. Anshari Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Ketentuan Umum Pasal 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Dasar 1945

- Wianarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Medpress, 2002
- Yusuf, Abu, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 48 dalam *Sa'id Hawwa*, Al-Islam, Terjemahan oleh. Abdul Hayyie Al-Kattani, Arif Chasanul Muna dan Sulaiman Mapiase, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Yusuf, Abu, *Kitab al-Kharaj*, hlm. 80 dalam Sabahuddin Azmi, *Islamic Economics; Public Finance In Early Islamic Thought*, Goodword Books, New Delhi, 2002, Edisi terj., *Ekonomi Islam, Keuangan Publik Dalam Pemikiran Islam Awal*, Bandung: Nuansa, 2005
- Zaky al-Kaaf, Abdullah, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002
- Zallum, Abdul Qadim, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Dar al-Ilmi Lilmalayin, Edisi terj. oleh Ahmad S, dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pegawai dan Staff Dinas Sosial Kabupaten Blitar**

1. Ada berapa jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar?
2. Apa kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial?
3. Apa kendala Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam menjalankan kebijakan terkait penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial?

### **B. Pengelola E-Warong**

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan E-Warong ini?
2. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan Dinas Sosial terkait pengadaan E-Warung ini?
3. Apa kendala yang anda temui dalam mengelola E-Warong ini?
4. Apa harapan anda ke depan bagi kebijakan Dinas Sosial terkait program ini?

### **C. Ketua Program Keluarga Harapan**

1. Bagaimanakah mekanisme Program Keluarga Harapan?



2. Apa kendala yang anda temui dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?
3. Apakah bantuan yang ada sudah tepat sasaran?
4. Apa harapan anda ke depan bagi kebijakan Dinas Sosial terkait program ini?

#### D. Masyarakat penerima bantuan

1. Bagaimana pendapat anda tentang bantuan yang selama ini anda terima seperti PKH yang merupakan salah satu program dari Dinas Sosial Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana perlakuan pendamping PKH selama ini?
3. Apa harapan anda ke depan bagi kebijakan Dinas Sosial terkait program ini?

#### E. Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan dinas sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial?
2. Apakah sudah sesuai kebijakan dinas sosial dengan fiqih siyasah maliyah?
3. Apa harapan anda ke depan bagi Dinas Sosial?

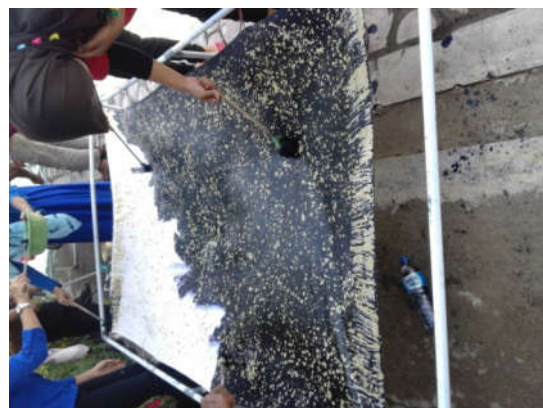
Konsultasi orang tua klien eks ODGJ  
dengan kasi rehabilitasi tuna sosial



Konsultasi mengenai adopsi anak  
bersama kasi rehabilitasi anak dan  
orangtua terlantar



Pelatihan ketrampilan pembuatan  
kerajinan keset oleh disabilitas



Pelatihan ketrampilan pembuatan  
kerajinan batik oleh disabilitas



Foto bersama pengelola E-Warung sekaligus ketua PKH



Shelter tampak dari depan



Pengarahan pegawai Dinas Sosial kepada anak terlantar (Robert Sanjaya)



Transaksi di E-Warung oleh penerima BPNT



Kebijakan Dinas Sosial terkait penanganan orang terlantar

